

Peningkatan Kapasitas Bisnis UKM Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Melalui Program Pendampingan

Saeful Bachri Djamil¹, Yogi Riguna²

^{1,2} STT Pratama Adi, Bandung, Indonesia

Email: saeful@sttpratamadi.ac.id¹, rigunayogi@gmail.com²

Abstrak

Kegiatan pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bisnis para pelaku UKM melalui pendekatan sistematis, partisipatif, dan kolaboratif lintas sektor. Dengan melibatkan 31 UKM dari enam kelurahan, program ini dimulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan UKM, perencanaan program pelatihan dan fasilitasi, hingga evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek legalitas usaha, manajemen keuangan, pengelolaan SDM, produksi, pemasaran digital, branding, serta kepemimpinan kewirausahaan. Evaluasi menunjukkan bahwa pelaku UKM merespons positif program ini dengan partisipasi aktif dan penerapan hasil pelatihan dalam operasional usaha sehari-hari. Program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pengembangan UKM berbasis wilayah.

Kata kunci: *UKM, Pendampingan, Kapasitas Bisnis, Pelatihan, Kolaborasi*

1. PENDAHULUAN

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional maupun lokal. UKM tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60,5% terhadap PDB dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Peran ini menjadikan UKM sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam masa pemulihan pascapandemi. Namun, di balik potensi tersebut, UKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat pengembangan usaha secara optimal, terutama di tingkat lokal. Keterbatasan dalam aspek legalitas usaha, akses pembiayaan, kapasitas manajerial, serta literasi digital menjadi persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi (Tambunan, 2019; Hadi et al., 2020).

Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, merupakan contoh wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor UKM. Dengan jumlah penduduk mencapai 114.778 jiwa pada tahun 2023, struktur ekonominya didominasi oleh sektor jasa, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan rumahan. UKM di wilayah ini mencakup ragam usaha, mulai dari kuliner khas lokal seperti bolen dan mochi, kerajinan dompet kulit, hingga produksi sambal kemasan dan makanan ringan.

Berdasarkan hasil survei melalui Google Form yang diberikan kepada pelaku UKM di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, masih ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi pelaku UMKM. Beberapa di antaranya adalah belum terpenuhinya legalitas usaha, lemahnya manajemen keuangan, kurangnya keterampilan tenaga kerja, serta strategi pemasaran dan branding yang belum optimal. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil survei Fitriani & Sugiharti (2021) yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% pelaku UKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, termasuk pembukuan arus kas dan pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha. Kondisi ini berdampak pada lemahnya transparansi dan kesulitan akses terhadap pembiayaan formal. Sementara itu, hasil survei Siregar & Sembiring (2022) serta Azzahra & Hartanto (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman teknologi dan rendahnya literasi digital menyebabkan para pelaku UMKM kurang mampu bersaing di pasar online yang kini menjadi arus utama distribusi produk pascapandemi. Kondisi yang dialami oleh UKM di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung perlu diperbaiki. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pendampingan yang tidak hanya bersifat pelatihan teknis, tetapi juga menyasar penguatan kapasitas digital dan transformasi manajerial UMKM secara menyeluruh. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini bertujuan untuk melakukan program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas bisnis UKM di kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

2. METODOLOGI

Tahapan yang dilakukan dalam proses pendampingan UKM Kecamatan Cibeunying Kidul untuk meningkatkan kapasitas bisnis dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Pendekatan ini sejalan dengan praktik umum pendampingan berbasis kebutuhan (*need-based approach*) dalam pemberdayaan masyarakat.

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan UKM

Tahap awal dilakukan untuk menggali secara spesifik permasalahan yang dihadapi pelaku UKM melalui instrumen seperti kuesioner daring (Google Form) dan diskusi kelompok terarah (*focused group discussion*). Metode pengumpulan data menggunakan kombinasi kuesioner dan Fokus Group Discussion (FGD) merupakan pendekatan yang umum dan efektif dalam kegiatan pendampingan.

Menurut Dewi, dkk. (2023), FGD bersama kuesioner digunakan untuk mendapatkan informasi sebagai dasar dalam penyusunan materi yang spesifik, menggali kebutuhan dan preferensi masyarakat dengan lebih mendalam.

2. Perencanaan Program Pendampingan

Berdasarkan hasil identifikasi, disusun rencana program yang meliputi jadwal pelatihan, jenis fasilitasi, serta metode pelaksanaan. Penyusunan rencana intervensi ini mengikuti prinsip relevansi dan kontekstualisasi kebutuhan lokal (Hadi et al., 2020).

3. Pelaksanaan Pendampingan

Tahap ini dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan langsung ke lokasi usaha (coaching), pelatihan tematik dalam kelompok (workshop), serta konsultasi teknis yang mencakup keuangan, pemasaran digital, dan produksi. Kombinasi metode ini telah terbukti efektif meningkatkan keterampilan kewirausahaan pelaku usaha (Fitriani & Sugiharti, 2021).

Keberhasilan pendampingan UMKM sangat bergantung pada dukungan multi-pihak, termasuk dinas pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Oleh karena itu perlu dilakukan kolaboratif lintas sektor. Pendekatan kolaboratif lintas sektor memungkinkan integrasi sumber daya dan memperluas akses pasar UMKM (Prasetyo et al., 2020).

4. Evaluasi dan Monitoring

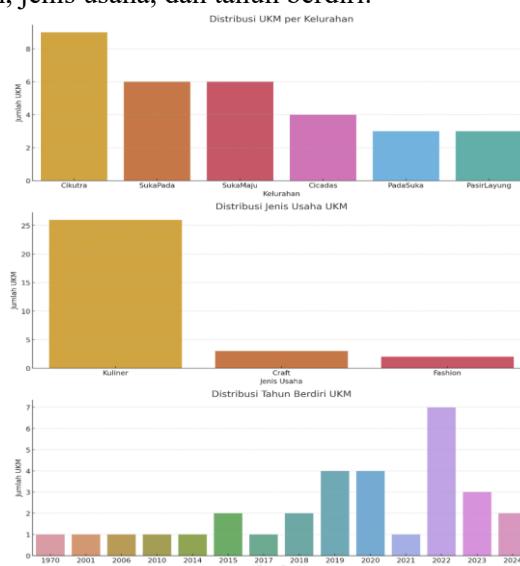
Evaluasi dilakukan untuk mengukur perubahan perilaku dan kapasitas usaha pelaku UMKM setelah pendampingan. Teknik yang digunakan mencakup observasi lapangan, umpan balik peserta, serta analisis perbandingan sebelum dan sesudah (Sumaryanto, 2022).

5. Rekomendasi Tindak Lanjut

Langkah terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk memastikan keberlanjutan dampak.

3. PELAKSANAAN

Penyusunan Kegiatan pendampingan UKM di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung dilaksanakan selama periode Maret hingga Oktober 2024, sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bisnis pelaku UKM secara menyeluruh. Kecamatan Cibeunying Kidul terdiri dari enam kelurahan—Cikutra, Cicadas, Sukamaju, Pasirlayung, Sukapada, dan Padasuka. Total UKM yang didampingi ada sekitar 31 UKM. Gambar 1 menunjukkan distribusi UKM berdasarkan kelurahan, jenis usaha, dan tahun berdiri.



Gambar 1. Distribusi UKM berdasarkan kelurahan, jenis usaha, dan tahun berdiri

Dari Gambar 1 terlihat bahwa Kelurahan Cikutra memiliki jumlah UMKM terbanyak, yaitu sebanyak 9 pelaku usaha. Disusul oleh Kelurahan SukaPada dan SukaMaju masing-masing dengan 6 UMKM. Sedangkan PasirLayung, Cicadas, dan PadaSuka masing-masing memiliki antara 3 hingga 4 UMKM. Hal ini menunjukkan konsentrasi kegiatan ekonomi mikro cukup merata, dengan Cikutra sebagai pusat pertumbuhan. Dominasi UMKM di sektor kuliner, yaitu sebanyak 26 dari 31 usaha. Jenis usaha lainnya yang muncul adalah craft (kerajinan) sebanyak 3 usaha dan fashion sebanyak 2 usaha. Artinya, hampir 84% UMKM yang tercatat bergerak di sektor makanan dan minuman, mencerminkan ketertarikan dan potensi lokal dalam bidang kuliner. UMKM yang terdaftar tersebar dari tahun 1970 hingga 2024, dengan tren peningkatan pada beberapa tahun terakhir. Tahun 2022 merupakan puncak tertinggi pendirian usaha dengan 7 UMKM baru, menandakan adanya gelombang kewirausahaan pascapandemi. Tahun 2019 dan 2020 juga mencatat jumlah yang signifikan, masing-masing 4 usaha. Ini menunjukkan bahwa UMKM di Cibeunying Kidul mengalami pertumbuhan pesat dalam 5 tahun terakhir.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan UKM ini adalah sebagai berikut :

A. Proses identifikasi masalah dan kebutuhan UKM

Proses identifikasi masalah dan kebutuhan UKM dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring (Google Form) dan diskusi kelompok (FGD) bersama para pelaku usaha di tiap kelurahan. Hasil kuesioner dan FGD menunjukkan bahwa permasalahan UKM di Kecamatan Cibeunying Kidul adalah :

1. Legalitas Usaha
Sebagian UKM belum memiliki legalitas usaha yang lengkap, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, sertifikasi halal, maupun hak kekayaan intelektual (HAKI). Ketidaksesuaian ini membatasi akses mereka terhadap pasar yang lebih luas dan program bantuan dari pemerintah atau lembaga pendukung lainnya.
2. Manajemen Operasional
Proses bisnis belum didukung oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan terstandarisasi. Akibatnya, alur kerja tidak terstruktur, efisiensi rendah, dan sulit untuk melakukan evaluasi kinerja secara sistematis.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Banyak UKM mengalami kekurangan tenaga kerja yang terampil dan cekatan. Rekrutmen tenaga kerja belum dilakukan secara sistematis, sehingga berdampak pada produktivitas dan kualitas layanan usaha yang belum optimal.
4. Manajemen Keuangan
Hampir 80% UKM tidak memiliki laporan keuangan sederhana maupun pencatatan arus kas. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha masih mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga menyulitkan proses evaluasi usaha dan pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan.
5. Manajemen Produksi
Sebagian UKM belum memiliki sistem manajemen produksi yang terorganisir dan terukur dengan baik. Proses produksi masih dilakukan secara konvensional tanpa perencanaan kapasitas, kontrol kualitas, atau efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga menghambat peningkatan produktivitas dan konsistensi produk.
6. Governance dan Kepemimpinan
Pelaku usaha umumnya belum memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, termasuk dalam merumuskan visi dan misi usaha yang jelas. Minimnya tata kelola (governance) internal yang baik menyebabkan arah pengembangan usaha tidak terfokus dan berisiko stagnan dalam jangka panjang.

7. Teknologi dan Sistem Informasi

Banyak UKM masih mengalami kesenjangan teknologi (*technology gap*), khususnya dalam pemanfaatan sistem informasi dan platform digital. Pemahaman terkait pemasaran digital, penggunaan marketplace, dan aplikasi bisnis masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan digital marketing serta pendampingan intensif dalam penggunaan teknologi berbasis aplikasi untuk mendukung penjualan online.

8. Pemasaran dan Penjualan

Permasalahan di aspek pemasaran antara lain desain kemasan produk yang kurang menarik, belum adanya strategi branding yang kuat, dan keterbatasan dalam memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. Produk yang dihasilkan sebagian besar masih dikemas secara sederhana dan belum mampu bersaing dari sisi visual atau citra merek.

B. Perencanaan Program Pendampingan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, disusun rencana program yang meliputi:

1. Legalitas Usaha

Fasilitasi legalitas usaha dilakukan melalui layanan dari Dinas Koperasi Kota Bandung dalam bentuk pendampingan pembuatan HAKI dan pengurusan izin usaha melalui DPMPTSP. Layanan ini tersedia melalui program SAKEDAP (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan) di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sertifikasi halal difasilitasi oleh Salman ITB, sementara izin PIRT dilakukan melalui Dinas Kesehatan.

2. Manajemen Operasional

Diselenggarakan pelatihan yang berfokus pada peningkatan efisiensi distribusi dan optimalisasi proses operasional usaha.

3. Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)

Diberikan pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja agar lebih terampil dan produktif.

4. Manajemen Keuangan

Intervensi dalam aspek keuangan mencakup:

- a. Pelatihan Manajemen Keuangan Dasar: Pembuatan pembukuan sederhana dan pemisahan keuangan pribadi dan usaha.
- b. Digitalisasi Pencatatan Keuangan: Pengenalan software akuntansi sederhana dan aplikasi mobile pencatatan keuangan harian.
- c. Perencanaan Keuangan dan Penganggaran: Pelatihan merancang alokasi keuangan usaha.
- d. Pelaporan Keuangan: Edukasi pelaporan keuangan secara sistematis.
- e. Literasi Keuangan Digital: Penggunaan e-wallet dan edukasi keamanan transaksi online.

5. Manajemen Produksi

Pelatihan manajemen produksi diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mutu proses produksi.

6. Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Pelaku UKM diberikan pelatihan kewirausahaan untuk memperkuat kepemimpinan, visi usaha, serta daya tahan dalam menghadapi tantangan bisnis.

7. Teknologi dan Sistem Informasi

Pelatihan pemasaran digital difokuskan pada pemanfaatan aplikasi marketplace dan media sosial untuk menunjang promosi dan penjualan produk secara online.

8. Pemasaran dan Penjualan

Intervensi yang diberikan meliputi:

- a. Pelatihan Branding: Penguatan identitas dan nilai produk.

- b. Pameran dan Bazar: Partisipasi dalam bazar tingkat kecamatan dan kota untuk memperluas jaringan pasar.
- c. Fasilitasi Kemasan Produk: Dukungan dari Dinas Koperasi Kota Bandung untuk meningkatkan daya tarik kemasan produk UKM.

C. Pelaksanaan Pendampingan

Untuk meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pendampingan dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

1. Pendampingan Secara Perseorangan

Pendampingan ini dilakukan melalui kunjungan kerja langsung ke lokasi usaha UKM. Tujuannya adalah untuk memberikan konsultasi spesifik sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan tiap pelaku usaha secara individual, serta memantau langsung perkembangan bisnisnya. Menurut Hadi, dkk. (2020), pendekatan personal ini sangat efektif untuk membangun kepercayaan, mengidentifikasi akar permasalahan, serta menumbuhkan motivasi pelaku usaha.

2. Pendampingan Kelompok

Selain secara individu, pelaku UKM juga mendapat pendampingan melalui pelatihan kelompok yang diselenggarakan di tingkat kota. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bersama melalui pembelajaran tematik yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di wilayah tersebut. Seperti dikemukakan oleh Sulastri dan Gustomo (2021), pelatihan berbasis kelompok efektif dalam membangun jejaring sosial (*social capital*) di antara pelaku usaha.

3. Kolaborasi dan Sinergi Lintas Sektor

Pelaksanaan program pendampingan melibatkan kolaborasi multipihak, mencakup instansi pemerintah dan lembaga mitra seperti Dinas Koperasi Kota Bandung (DISKOP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI), Strive Indonesia, serta platform marketplace seperti Shopee. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing UKM. Pendampingan UMKM akan lebih kuat jika melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Model kolaboratif ini mendukung integrasi sumber daya, regulasi, dan fasilitasi pasar secara lebih sistematis. Menurut Prasetyo et al. (2020), sinergi multi-aktor penting untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan lokal dan menciptakan keberlanjutan program.

4. Konsultasi Perseorangan Secara Tatap Muka

Pendampingan juga difasilitasi melalui sesi konsultasi langsung antara pendamping dan pelaku usaha, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Pendekatan ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk berdiskusi lebih fleksibel dan mendapatkan solusi konkret terhadap permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Gambar 2 memperlihatkan kegiatan pendampingan terhadap UKM di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.



Gambar 2 Kegiatan pendampingan terhadap UKM di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

D. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi kegiatan pendampingan UMKM di Kecamatan Cibeunying Kidul dilakukan untuk mengukur efektivitas program serta dampak nyata yang dirasakan oleh pelaku usaha setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui observasi lapangan, wawancara, penyebaran kuesioner evaluatif, serta dokumentasi hasil pendampingan. Hasil evaluasi dikelompokkan berdasarkan aspek intervensi utama berikut:

- 1. Legalitas Usaha**
Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi PIRT, halal, maupun HAKI. Setelah pendampingan, sebagian besar pelaku usaha telah memperoleh akses ke layanan legalitas melalui fasilitasi program *Sakedap* dan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan mitra seperti Salman ITB. Proses legalisasi dirasakan lebih mudah, cepat, dan terarah dibanding sebelumnya.
- 2. Manajemen Keuangan**
Sebelum pendampingan, sekitar 80% pelaku usaha tidak memiliki pencatatan keuangan atau masih mencampur antara keuangan pribadi dan usaha. Setelah pelatihan, banyak peserta mulai menerapkan pembukuan sederhana dan menggunakan aplikasi keuangan berbasis mobile. Sebagian UMKM juga mulai menyusun laporan arus kas serta merencanakan alokasi anggaran usaha secara mandiri.
- 3. Pengelolaan SDM**
Pendampingan dalam bentuk pelatihan SDM mendorong pelaku usaha untuk mulai menyusun struktur kerja, mendefinisikan peran karyawan, serta menerapkan proses rekrutmen yang lebih terarah. Meski belum semua usaha berskala menengah, perubahan kecil seperti pembagian tugas dan shift kerja sudah mulai diterapkan oleh beberapa pelaku usaha.

4. Operasional dan Produksi

Dari sisi operasional, evaluasi menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses bisnis. Beberapa UMKM mulai menerapkan sistem inventaris untuk mencatat bahan baku dan produk jadi. Sementara itu, di bidang produksi, pelaku usaha terdorong untuk mengefisiensikan penggunaan sumber daya, memperbaiki alur produksi, dan menjaga standar kualitas produk.

5. Pemasaran dan Digitalisasi

Adopsi strategi digital marketing menjadi salah satu hasil paling nyata dari program ini. Sebelum pendampingan, sebagian besar pelaku usaha hanya mengandalkan penjualan konvensional. Kini, mereka telah memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp Business, dan marketplace seperti Shopee untuk memasarkan produk. Bahkan beberapa UMKM mencatat peningkatan transaksi setelah mulai berpromosi secara daring.

6. Branding dan Pengemasan

Pelatihan branding dan kemasan mendorong pelaku UMKM memperbaiki tampilan produk agar lebih menarik dan profesional. Kemasan yang sebelumnya sederhana kini sudah lebih informatif, higienis, dan layak jual di pasar yang lebih luas. Beberapa produk bahkan telah difasilitasi untuk mengikuti bazar kecamatan dan kota.

7. Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Aspek ini dievaluasi melalui wawancara dan diskusi pasca pelatihan. Sebagian peserta menunjukkan peningkatan motivasi, pemahaman visi usaha, serta kesadaran pentingnya berpikir strategis dalam mengelola bisnis. Meskipun masih terbatas pada usaha mikro, pelaku mulai memahami pentingnya orientasi pertumbuhan jangka panjang.

8. Partisipasi dan Kolaborasi

Evaluasi juga menunjukkan bahwa pelaku usaha sangat antusias mengikuti kegiatan, dengan tingkat kehadiran tinggi dan keterlibatan aktif dalam diskusi. Pendampingan mendorong terbentuknya jejaring antar pelaku UMKM dan meningkatkan komunikasi lintas kelurahan.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan memberikan dampak yang positif dan terukur terhadap perkembangan kapasitas UMKM. Meskipun terdapat perbedaan tingkat kemajuan antar pelaku usaha, hampir semua peserta menyatakan program ini sangat membantu dan perlu dilanjutkan secara berkelanjutan.

E. Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk keberlanjutan program, direkomendasikan beberapa langkah tindak lanjut. Pertama, dibentuk database UMKM berbasis kelurahan yang dapat digunakan untuk pemetaan potensi dan penyaluran program. Kedua, perlu dibangun pojok konsultasi bisnis di kantor kecamatan yang dapat diakses pelaku usaha untuk pendampingan lanjutan. Ketiga, dilakukan penguatan branding kawasan melalui pengembangan identitas produk khas Cibeunying Kidul. Keempat, mendorong kerja sama antar-UMKM melalui kelompok usaha bersama atau koperasi agar tercipta efisiensi rantai pasok lokal. Terakhir, perlu dikembangkan pusat inovasi produk dan desain kemasan untuk mendukung daya saing pasar.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini berhasil mendorong transformasi positif pada UMKM di Cibeunying Kidul, baik dalam peningkatan kompetensi, struktur manajerial, maupun orientasi bisnis digital. Program ini diharapkan dapat menjadi model keberlanjutan untuk pengembangan UMKM berbasis wilayah dengan kolaborasi multipihak dan intervensi yang menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan UKM di Kecamatan Cibeunying Kidul telah memberikan dampak nyata dan positif terhadap penguatan kapasitas usaha lokal. Berbagai aspek seperti legalitas, manajemen keuangan, SDM, produksi, hingga pemasaran digital mengalami peningkatan melalui program pelatihan yang tepat sasaran. Kolaborasi antara perguruan tinggi, dinas terkait, dan mitra swasta menjadi kunci keberhasilan program ini. Untuk keberlanjutan dampak, perlu dibentuk sistem pendukung seperti database UKM, pojok konsultasi bisnis, dan pusat inovasi produk. Model ini layak direplikasi sebagai pendekatan pengembangan UKM berbasis wilayah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, serta para pelaku UKM yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azzahra, A., & Hartanto, R. (2021). *Transformasi digital UMKM Indonesia di era new normal: Peluang dan tantangan*. Jurnal Ekonomi dan Teknologi, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.24198/jet.v12i1.41283>
- [2] Dewi, E. P., Suwartane, I. G. A., Adriani, H., & Rahmawati, K. J. (2023). *Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan dalam Perekutan dan Pelatihan Kompetensi bagi Pemuda Desa Miskin Putus Kerja sebagai Pemandu Wisata Trekking Sentul, Bogor*. Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, 7(3). <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v7i3>
- [3] Fitriani, D., & Sugiharti, L. (2021). *Peran literasi keuangan dalam meningkatkan kinerja UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 24(2), 115–126. <https://doi.org/10.24843/JEB.2021.v24.i02.p03>
- [4] Hadi, S., Rahardjo, B., & Wibowo, H. (2020). *Model pendampingan UMKM berbasis penguatan kapasitas lokal dalam rangka pengabdian masyarakat*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(1), 55–66. <https://doi.org/10.22146/jpkm.51902>
- [5] Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Data Statistik UMKM Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Deputi Bidang Usaha Mikro.
- [6] Prasetyo, P. E., Sutanto, E. M., & Marwa, T. (2020). *Collaborative approach for sustainable MSMEs development in Indonesia: A policy perspective*. Journal of Enterprising Communities, 14(2), 247–263. <https://doi.org/10.1108/JEC-09-2019-0087>
- [7] Siregar, M. A., & Sembiring, B. (2022). *Digitalisasi UMKM pascapandemi COVID-19: Tantangan dan strategi adaptif*. Jurnal Manajemen Teknologi, 21(1), 45–56. <https://doi.org/10.14710/jmt.21.1.45-56>
- [8] Sulastri, D., & Gustomo, A. (2021). *Social capital and knowledge sharing in MSMEs training programs*. Jurnal Manajemen Teknologi, 20(3), 233–242. <https://doi.org/10.14710/jmt.20.3.233-242>
- [9] Sumaryanto, E. (2022). *Evaluasi program pendampingan UMKM dalam pengembangan bisnis berbasis teknologi digital*. Jurnal Ilmu Administrasi, 19(1), 87–100. <https://doi.org/10.20476/jia.v19i1.4567>
- [10] Tambunan, T. H. (2019). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.